

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laut dan ekosistemnya laut menyediakan beragam kekayaan ekosistem dan sumber daya yang penting bagi kelangsungan hidup manusia seperti nutrisi, ekonomi, dan kesejahteraan sosial budaya. Namun, tidak seperti properti di darat yang dimiliki secara pribadi karena laut tidak dimiliki oleh perorangan, tetapi tersedia untuk seluruh masyarakat (WOR, 2015). Sehingga, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut menetapkan wilayah hak-hak nasional atas sumber daya laut, yang dikenal sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Oleh karena itu, setiap negara bertanggung jawab atas perikanan berkelanjutan dan dampak potensial sektor yang bergantung pada laut di dalam ZEE mereka (UNCLOS, 1982). Namun, lautan menghadapi berbagai ancaman dari aktivitas antropogenik yang berdampak signifikan dan tidak hanya membahayakan kehidupan laut serta keanekaragaman hayati, tetapi juga berdampak pada kehidupan miliaran orang yang bergantung pada laut sebagai sumber makanan, pendapatan, rekreasi, dan identitas budaya (Molony et al., 2022).

Pentingnya lautan telah diakui secara global dengan berbagai peristiwa politik penting yang terjadi untuk membahas keberlanjutan lautan kita. Pada tahun 2020, "Dekade Ilmu Pengetahuan Kelautan untuk Pembangunan Berkelanjutan" yang akan berlangsung dari tahun 2021 hingga 2030 diumumkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang bertujuan untuk mendorong aksi dan pendanaan untuk ilmu pengetahuan kelautan (UNESCO, 2020). Ilmu pengetahuan interdisipliner dan

berorientasi pada solusi sangat penting untuk mencapai lautan yang sehat dan berkelanjutan (Visbeck, 2018).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai produksi perusahaan penangkapan ikan mencapai Rp. 2,77 triliun dengan volume produksi 187.272 ton pada tahun 2020. Nilai ini meningkat sebesar 17% dari Rp. 2,37 triliun pada tahun 2019. Ikan tongkol tercatat sebagai jenis ikan dengan nilai transaksi tertinggi secara nasional pada tahun lalu. Indonesia memproduksi ikan tongkol sebanyak 20.907 ton pada tahun 2020, dengan nilai transaksi mencapai Rp. 457,34 miliar. Ikan tuna berada di posisi kedua dengan nilai produksi sebesar Rp. 423,86 miliar dan volume produksi 12.995 ton. Selanjutnya, nilai produksi ikan cakalang mencapai Rp. 316,19 miliar dengan volume produksi 20.174 ton. Produksi udang memiliki nilai sebesar Rp. 76,02 miliar dengan volume produksi 15.200 ton. Terakhir, produksi jenis ikan lainnya tercatat sebesar Rp. 1,49 triliun dengan volume produksi 117.996 ton (Pahlevi, 2021).

Tabel 1.1 Nilai Produksi Penangkapan Ikan

Nama Data	Value
Tongkol	457,34
Tuna	423,59
Cakalang	316,19
Udang	76,02
Lainnya	1.491

Sumber: Databoks, 2021.

Satu hal yang perlu diketahui adalah jumlah stok tuna tergantung pada berapa banyaknya ikan yang ditarik dari lautan, tetapi juga tergantung pada ciri-ciri

masing-masing spesies. Ikan cakalang berukuran lebih kecil, tetapi berkembang biak dengan cepat dan sering, mencapai kematangan seksual pada usia satu tahun. Sedangkan spesies sirip biru tidak bereproduksi hingga mereka berusia lima hingga lima belas tahun, itupun hanya sekali dalam setahun. Cakalang dapat memulihkan populasinya lebih cepat daripada sirip biru dan lebih tahan terhadap tekanan penangkapan ikan (Lafreine, 2017). Status perlindungan ikan tuna sirip biru dibandingkan dengan ikan cakalang sebagian besar berasal dari perbedaan status populasi, tekanan penangkapan, dan riwayat hidup mereka:

1. Status Populasi: Populasi tuna sirip biru, terutama tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik, telah mengalami penangkapan berlebihan selama bertahun-tahun dan dianggap rentan atau terancam punah, tergantung pada spesies tertentu. Populasi mereka telah menurun secara signifikan karena permintaan tinggi, terutama untuk pasar sushi dan sashimi. Sebaliknya, populasi ikan cakalang dianggap relatif stabil dan saat ini tidak mengalami penangkapan berlebihan.
2. Tingkat Reproduksi dan Umur: Tuna sirip biru memiliki tingkat reproduksi yang lebih lambat, membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai kematangan, dan hidup lebih lama dibandingkan dengan ikan cakalang. Tuna sirip biru dapat membutuhkan waktu hingga 8 tahun untuk mencapai kematangan, sementara ikan cakalang matang hanya dalam 1 hingga 2 tahun. Ini berarti populasi tuna sirip biru pulih lebih lambat dari penangkapan berlebihan.
3. Tekanan Penangkapan dan Pengelolaan: Tuna sirip biru menjadi target perikanan komersial bernilai tinggi, yang memberikan banyak tekanan pada populasi mereka. Peraturan ketat dan perjanjian internasional, seperti kuota dan

batasan ukuran, telah diberlakukan untuk mencoba melindungi mereka. Ikan cakalang, di sisi lain, adalah salah satu spesies tuna yang paling melimpah dan umum ditangkap, dan mereka menghadapi tekanan penangkapan yang kurang parah.

4. Permintaan Pasar: Nilai pasar yang tinggi dari tuna sirip biru mendorong upaya penangkapan intensif, membuat mereka lebih rentan terhadap penangkapan berlebihan. Ikan cakalang, meskipun penting untuk pengalangan komersial dan sebagai sumber makanan, tidak memperoleh harga setinggi tuna sirip biru, menyebabkan tingkat intensitas penangkapan dan kebutuhan konservasi yang berbeda.
5. Status Konservasi: Karena faktor-faktor yang disebutkan di atas, tuna sirip biru telah terdaftar dalam berbagai status konservasi yang memberikan mereka perlindungan tertentu berdasarkan perjanjian internasional. Ikan cakalang, karena populasi mereka yang stabil dan reproduksi yang lebih cepat, tidak menjadi subjek kekhawatiran yang sama dan karenanya tidak memiliki perlindungan yang sama.

Tujuan utama dari pemanfaatan tuna adalah untuk meningkatkan produksi yang dapat mendorong volume dan nilai ekspor. Selama tiga tahun terakhir (2021-2023), volume dan nilai ekspor tuna menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), nilai ekspor tuna Indonesia pada tahun 2023 mencapai USD 927,13 juta. Ekspor ini berasal dari produksi di perairan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan laut lepas. Secara keseluruhan, ekspor tuna, cakalang, dan tongkol (TCT) dari Indonesia sebagian besar dalam bentuk fillet dengan kontribusi sebesar 39,4 persen, diikuti oleh tuna dalam kemasan kedap

udara sebesar 28,7 persen, dan kemasan tidak kedap udara sebesar 7,4 persen (Mongabay, 2024).

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan sekitar 17.508 pulau. Pada tahun 2012, produksi perikanan Indonesia mencapai sekitar 9,5 juta ton, dimana sekitar 95% dari produksi perikanan berasal dari nelayan tradisional (FAO, 2014). Hal ini berhasil membawa Indonesia menjadi negara produsen tuna, cakalang, dan tongkol terbesar di dunia. Hasil tangkapan tuna Indonesia sekitar satu juta ton per tahun atau 16 persen dari total pasokan tuna dunia (Indonesia Seafood, 2023). Menurut pejabat tinggi di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, sektor perikanan Indonesia terancam akibat maraknya praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing). Kerugian akibat kegiatan ini terus bertambah tiap tahun. Banyak pelaku lolos dari hukuman karena kurangnya pemahaman mendalam tentang IUU Fishing di kalangan jaksa di Indonesia. (Maulana, 2017).

Indonesia dianggap sebagai daerah utama dalam hal tidak dilaporkannya hasil tangkapan ikan; setidaknya 25% dari hasil tangkapan ikan global tidak dilaporkan. Selain itu, mengingat situasi geografis Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, sulit untuk melakukan pengumpulan data perikanan dengan mudah dan dapat diandalkan sehingga tangkapan yang tidak dilaporkan merupakan hal yang umum terjadi (Khan et al., 2023).

Sumber lain dari penangkapan ikan yang tidak dilaporkan oleh nelayan Indonesia adalah ketidakmauan mereka untuk melaporkan hasil tangkapan mereka, ditambah dengan keinginan untuk memalsukan hasil tangkapan oleh perikanan skala industri untuk menghindari pembayaran pajak (Sodik, 2009). Praktik

penangkapan ikan yang tidak dilaporkan juga dilakukan oleh nelayan di negara tempat mereka beroperasi dan juga oleh perusahaan pengolahan untuk menghindari konsekuensi keuangan yang tidak diinginkan dan/atau untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari penangkapan ikan (Ritonga et al., 2019).

Penangkapan ikan IUU berdampak pada dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi. Pertama, dari perspektif sosial, jumlah nelayan telah menurun selama lebih dari satu dekade dari 1,6 juta pada tahun 2003 menjadi 868.000 pada tahun 2013. Selain itu, meskipun konsumsi ikan secara signifikan berkontribusi terhadap gizi anak-anak, penurunan jumlah tangkapan ikan mengakibatkan kurangnya asupan gizi dari sumber ikan untuk anak-anak, yang pada akhirnya dapat menyebabkan rusaknya stabilitas sosial di masyarakat pesisir. Kedua, dari sisi ekonomi, praktik IUU fishing berdampak pada pendapatan ekspor nasional. Ketiga, penangkapan ikan IUU oleh pukat super dan perusakan terumbu karang yang terkait menyebabkan degradasi lingkungan yang masif, yang mempengaruhi penangkapan ikan skala kecil dan industri (Sodik, 2009).

Berdasarkan laporan IUU Fishing Risk Index pada tahun 2023 Indonesia berada pada ranking ke 6 sebagai negara dengan performa terburuk dari 152 negara, meningkat 14 poin dari tahun sebelumnya. Tingkat kerentanan Indonesia juga konsisten berada pada posisi 6 besar sejak tahun 2019 (IUUfishingindex, 2023). Hal ini didukung dengan laporan yang dilakukan media dimana terjadi peningkatan laporan yang signifikan pada tahun 2021 dibanding sebelumnya seperti yang terdapat pada Tabel 1.2 (Khan et al., 2024).

Tabel 1.2 *Media-reported IUU fishing in Indonesia*

IUU Activity	Location	Reporting Entity	Year	Headline
Government measure against IUU fishing in Indonesia	Malacca Strait	CNN Indonesia	2023	17 Vessels Arrested While Stealing Fish in Malacca Strait
Fishery policy to fight IUU fishing in Indonesia	Indonesia	Kompas	2023	Illegal Fishing Ships Still A Threat
Law enforcement against IUU fishing in Indonesia	Natuna Sea	KKP News	2023	KKP Arrests Illegal Vessels From Vietnam in Natuna Sea
Fishery policy to fight IUU fishing in Indonesia	Jakarta	Antara News	2023	KKP fights IUU fishing through PIT and integrated supervision
Government measure against IUU fishing in Indonesia	North Natuna Sea	Mongabay	2023	Philippine Illegal Fishing Vessel Arrested, Use New Mode
Government measure against IUU fishing in Indonesia, territorial violation	North Natuna Sea	CNN Indonesia	2022	Indonesian Navy Arrest Three Vietnamese Fishing Vessels in the North Natuna Sea
Government measure against IUU fishing in Indonesia, territorial violation, misuse of Indonesian identity	Malacca Strait	CNN Indonesia	2022	Malaysian Vessel Suspected of Stealing Fish in the Malacca Strait, Mode of Using Indonesian Crews
Government measure against IUU fishing in Indonesia, territorial violation	Aceh	CNN Indonesia	2022	Ships with Indian flags steal fish in Aceh waters
Government measure against IUU fishing in Indonesia	Raja Ampat, Lampung, Peleng Strait, Tolo Bay,	CNN Indonesia	2022	KKP Arrests 22 Illegal Fishing Boats in 6 Medio

	Riau Archipelago, Sulawesi Sea and Java Sea			Regions March 2022
Government measure against IUU fishing in Indonesia	Jakarta	CNN Indonesia	2022	KKP Captures 83 Fishing Boats Throughout Semester I 2022
Government measure against IUU fishing in Indonesia, destructive fishing, territorial violation	North Natuna Sea	CNN Indonesia	2022	Indonesian Navy Seizes Two Vietnamese Fishing Boats in the North Natuna Sea
Law enforcement against IUU fishing in Indonesia	Malacca Strait	Tempo	2022	KKP Arrests Illegal Fishing Vessel From Malaysia in Malacca Strait
Negative impact from IUU fishing in Indonesia	Indonesia	Nusantara Maritime News	2022	Fishing Concessions and a Repeating Story of Irony
Government measure against IUU fishing in Indonesia, territorial violation	Natuna Sea	CNN Indonesia	2022	OTT Fish Theft in Natuna, 17 Vietnamese crew members detained on the Bakamla Ship
Law enforcement against destructive fishing and IUU fishing in Indonesia	North Natuna Sea	Republika	2022	KKP Arrests Two Foreign Vessels for Illegal Fishing in the North Natuna Sea
Law enforcement against destructive fishing and IUU fishing in Indonesia	Natuna Sea	CNN Indonesia	2022	Bakamla Catches Vietnamese Ship Stealing 2 Tons of Fish in the Natuna Sea
Law enforcement against destructive fishing and IUU fishing in Indonesia	Natuna Sea, Java Sea and Kupang Bay	CNN Indonesia	2021	KKP Arrests 7 Fishing Boats Violating Regulations, One from Malaysia
Law enforcement against IUU fishing in Indonesia	Natuna Sea	CNN Indonesia	2021	Researchers Reveal Rows of Illegal Foreign Ships in Natuna

Government measure against IUU fishing in Indonesia, human trafficking, destructive fishing	Malacca Strait	CNN Indonesia	2021	KKP Seizes Malaysian Fishing Boats Manned by Indonesian Citizens in Malacca Strait
Government measure against IUU fishing in Indonesia, human trafficking, destructive fishing	Indonesia	CNN Indonesia	2021	KKP Arrests 125 Fishing Boats Until the End of July 2021
Government measure against IUU fishing in Indonesia, human trafficking, destructive fishing	Natuna Sea	CNN Indonesia	2021	Illegal Fishing in Natuna, 17 Vietnamese crew members were charged with the Ciptaker Law
Government measure against IUU fishing in Indonesia, territorial violation	North Natuna Sea	Kompas.com	2021	Indonesian Navy Arrests Taiwan-flagged Foreign Vessel in North Natuna Sea
Government measure against IUU fishing in Indonesia	North Natuna Sea	Mongabay	2019	Indonesia is Outraged at Foreign Fishing Ships Perpetrating Fish Theft
Government measure against IUU fishing in Indonesia	Jakarta	CNN Indonesia	2019	RI Sends Strong Protest to China because Ship Breaks Through Natuna
Government measure against IUU fishing in Indonesia	North Natuna Sea, Malacca Strait	Mongabay	2019	KKP Arrests 8 Illegal Foreign Fishing Vessels from Vietnam and Malaysia Again
Government measure against IUU fishing and fisheries crime in Indonesia	Indonesia	Kompas.com	2018	Against Illegal Fishing, Sinking of 488 Ships, and Their Positive Impacts
Government measure against IUU fishing in Indonesia	Tanjung Uban, Bintan, Riau Archipelago	Kompas.com	2016	Jokowi: FV Viking Ship Will Be Half-Sunked

Forgery of identity of foreign fishermen	Bitung	CNN Indonesia	2016	Minister Susi: Six Thousand Foreign Crews Fake Indonesian KTPs

Sumber : (Khan et al., 2024).

Studi yang dilakukan pada tahun 2012 mengungkapkan bahwa di antara 28 negara penghasil ikan, Indonesia berada di posisi paling berisiko mengalami kehancuran sektor perikanan. Penilaian ini didasarkan pada tiga faktor utama: pengelolaan terumbu karang, kondisi industri perikanan, dan ketahanan pangan negara tersebut (Hughes et al., 2012). Penelitian ini terbukti berdasarkan statistik FAO yang menunjukkan produksi tuna di Indonesia telah menurun dari level tertinggi 16,1 juta ton pada tahun 2017 menjadi 14,6 juta ton pada tahun 2021 (Indonesia Seafood, 2023). Hal ini yang menyebabkan laut Indonesia sebagian besar ekosistemnya berada dalam ancaman yakni terdapat penurunan biota laut akibat krisis ganda dari degradasi ekosistem kelautan serta penangkapan ikan berlebih (Greenpeace, 2014). Sumber daya tuna di perairan Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan. Spesies tuna sirip biru selatan telah dieksploitasi habis-habisan, dengan tuna sirip biru selatan yang dieksploitasi habis-habisan dan tuna mata besar diklasifikasikan sebagai tuna yang dieksploitasi habis-habisan di semua wilayah kecuali di perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali (Telesetski, 2014).

Industri tuna sangat berperan penting di Indonesia karena kelimpahannya dan tersedianya sumber daya di Indonesia. Ikan tuna merupakan salah satu jenis ikan ekonomis penting di dunia dan merupakan perikanan terbesar ketiga, Indonesia menjadi negara penting bagi perikanan tuna global (KKP, 2017). Meskipun

Indonesia memperoleh keuntungan besar dari produksi ikan tuna, hal ini justru mengancam kelangsungan hidup berbagai spesies tuna di perairan Indonesia. Menurut Komisi Tuna Samudera Hindia (IOTC), penangkapan tuna di Indonesia telah melampaui batas berkelanjutan. Tuna sirip kuning telah masuk kategori kritis, sementara spesies lain seperti tuna sirip biru selatan, cakalang, dan tuna mata besar juga menghadapi risiko serius. (Katadata, 2017).

Indonesia berperan besar dalam pasokan tuna, tongkol, dan cakalang global, menyumbang lebih dari 16% produksi dunia. Pada 2013, ekspor ketiga jenis ikan ini mencapai sekitar 209.410 ton, bernilai USD 764,8 juta. Data dekade terakhir menunjukkan tren peningkatan produksi tuna dan cakalang di Indonesia. Rata-rata produksi tahunan mencapai 560.941 ton, dengan nilai Rp 7,2 triliun. Sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap industri perikanan nasional, menyumbang sekitar 20% dari total tangkapan ikan Indonesia pada periode 2005-2012. (Firdaus et al., 2018).

Analisis periode 1992-2015 menunjukkan penurunan stok ikan tuna dan cakalang, dengan rata-rata deplesi volume sebesar 2,2828 ton per tahun. Secara moneter, deplesi ini bernilai sekitar 182,23 miliar rupiah tahunan. Nilai negatif deplesi ini mengindikasikan bahwa produksi aktual melebihi tingkat produksi berkelanjutan sumber daya. Fenomena ini menandakan terjadinya penangkapan berlebih (*overfishing*) pada populasi tuna dan cakalang di perairan Indonesia. Temuan ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk merevisi kebijakan pengelolaan perikanan, terutama dari sisi input, guna mencegah *overfishing* lebih lanjut di masa depan (Firdaus et al., 2018).

Dalam mengatasi masalah ini seluruh pihak wajib untuk ikut berpartisipasi dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Peran pemerintah saja tidak cukup untuk menangani permasalahan ini. Kompleksnya hubungan internasional saat ini juga telah menumbuhkan peran aktor non-negara yang dapat ikut berpartisipasi juga untuk mengatasi fenomena ini, sehingga peran serta individu hingga kelompok organisasi internasional berpengaruh signifikan (Auliarini & Jamaan, 2012). Pada saat ini ruang lingkup INGO meliputi semua tingkat kemasyarakatan dan pemerintahan mulai dari komunitas lokal atau *grassroot community* hingga tingkat politik nasional dan internasional.

Penanganan masalah lingkungan, khususnya di sektor kelautan dan perikanan, tidak hanya menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah. Organisasi non-pemerintah internasional (INGO) seperti World Wildlife Fund for Nature (WWF) juga berperan penting. Menurut Karns et al. (2015), INGO adalah organisasi sukarela yang dibentuk oleh pihak swasta, terdiri dari individu atau kelompok yang bersatu untuk mencapai tujuan bersama. WWF, sebagai INGO, berfokus pada perlindungan spesies, habitat alami, dan ekosistem, serta mendorong pembangunan berkelanjutan global. Organisasi ini berkolaborasi dengan komunitas lokal, pemerintah, sektor bisnis, dan berbagai organisasi lainnya. WWF memiliki jaringan di 100 negara, mengadaptasi upayanya sesuai konteks lokal. Di Indonesia, WWF bertujuan melestarikan, memulihkan, dan mengelola ekosistem serta keanekaragaman hayati secara adil dan berkelanjutan (WWF, n.d).

WWF-Indonesia melihat masih ada spesies-spesies yang terancam termasuk Tuna, oleh karena itu WWF memiliki inisiatif untuk membuat program kerja *Seafood Savers* yang bertujuan untuk menjembatani setiap aktor dalam

mewujudkan perikanan yang berkelanjutan dan membuat perikanan Indonesia ke arah yang lebih baik. Program ini secara garis besar memiliki kegiatan memberikan asistensi kepada perusahaan dan nelayan agar menjalankan aktivitas industrinya bertanggung jawab dan ramah lingkungan, serta mengadvokasi kepada pemerintah terkait regulasi yang tidak merugikan alam dan memberikan edukasi kepada konsumen agar memilih produk perikanan yang baik (Seafoodsavers, n.d).

Seafood Savers menggunakan dua standar sertifikasi utama untuk perikanan berkelanjutan: *Marine Stewardship Council* (MSC) untuk perikanan tangkap dan *Aquaculture Stewardship Council* (ASC) untuk perikanan budidaya. Standar ini menjadi dasar Program Perbaikan Perikanan tangkap dan budidaya (FIP/AIP) yang diterapkan pada perusahaan anggota *Seafood Savers*. MSC tidak hanya memberikan sertifikasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat promosi untuk produk seafood dari perikanan tangkap yang dikelola secara berkelanjutan. Sementara itu, ASC berfokus pada sertifikasi dan promosi produk dari praktik budidaya yang bertanggung jawab, dengan tujuan meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem. (*Seafood Savers*, n.d.-a)

Oleh karena itu, penting untuk menghentikan masalah *overfishing* ini, tidak hanya demi melestarikan sumberdaya laut secara berkelanjutan juga untuk menjaga kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Sejalan dengan aksi dan upaya yang dilakukan oleh WWF Indonesia, penyelesaian masalah ini akan tidak hanya akan menyelesaikan berbagai masalah dalam industri perikanan namun menjadi bentuk investasi Indonesia sebagai negara kepulauan yang mana berdampak untuk seluruh masyarakat dunia. Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik dalam mengangkat isu tersebut, serta kurangnya penelitian yang spesifik membahas mengenai

bagaimana peran serta upaya WWF-Indonesia sebagai *International Non-Governmental Organization* dalam melindungi keberlangsungan ikan tuna dan ekosistem laut yang terancam keberadaanya. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana peran dan upaya WWF-Indonesia dalam melindungi laut dari *overfishing* di Indonesia. Maka dari itu penulis membahas mengenai **“Upaya World Wildlife Fund for Nature Indonesia Dalam Menangani Isu *overfishing* Tuna di Indonesia”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis memutuskan untuk memilih permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah “Bagaimana program *Seafood Savers* menangani isu *overfishing* ikan tuna di Indonesia?”

1.3 Pembatasan Masalah

Penulis memberi batasan masalah agar lebih efektif dan efisien dengan memfokuskan permasalahan pada peran dari WWF melalui program *Seafood Savers* dalam mengadvokasikan isu *overfishing* ikan tuna dimana penulis membatasi periode upaya *Seafood Savers* pada kurun waktu tahun 2019-2023.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk melihat peran WWF dalam masalah isu lingkungan kelautan di Indonesia.

2. Untuk mengetahui kondisi masalah *overfishing* terhadap laut di Indonesia.
3. Untuk mengetahui implementasi program *Seafood Savers* dalam menanggulangi *overfishing* di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam khazanah keilmuan, khususnya dalam disiplin ilmu Hubungan Internasional mengenai peran WWF Indonesia dalam mendorong isu lingkungan pada lingkungan internasional.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana strata satu Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan Bandung.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Menjadi media untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam suatu bentuk karya tulis ilmiah.
 - b. Menjadi media untuk melakukan studi secara lebih komprehensif mengenai disiplin Ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam bidang Organisasi Internasional Non-Pemerintah, Kebijakan Luar Negeri, dan isu mengenai lingkungan.
2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi kepada masyarakat secara lebih luas mengenai kinerja suatu organisasi internasional

non pemerintah yang bergerak dalam bidang lingkungan yang berdampak kepada masyarakat dunia.